

Peran Bantuan Sosial Dalam Mengurangi Ketimpangan Antar 34 Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2018-2024

Putri Sabila¹, Nasywa Febriane², Keisya Inayah³, Wahyu Destiani⁴, Muhammad Ariel Fattah⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 30, 2025

Revised Juli 1, 2025

Accepted Juli 1, 2025

Kata Kunci:

Bantuan Sosial,
Ketimpangan Provinsi,
Gini Ratio,
Indonesia,

Keywords:

Social Assistance,
Provincial Inequality,
Gini Ratio,
Indonesia.

ABSTRAK

Ketimpangan ekonomi antarprovinsi masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional di Indonesia. Bantuan sosial sebagai instrumen fiskal diharapkan mampu mengurangi ketimpangan melalui peningkatan kesejahteraan kelompok miskin. Penelitian ini menganalisis peran bantuan sosial terhadap ketimpangan di 34 provinsi Indonesia selama 2018–2024 dengan menggunakan data panel dan regresi efek tetap serta efek acak. Hasil menunjukkan bahwa bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rasio Gini, meskipun efektivitasnya bervariasi antar wilayah. Temuan ini menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran bantuan sosial dan sinergi dengan program pemberdayaan ekonomi.

ABSTRACT

Interprovincial economic inequality remains a major challenge in Indonesia's national development. Social assistance, as a fiscal instrument, is expected to reduce inequality by improving the welfare of the poor. This study examines the role of social assistance in reducing inequality across 34 provinces during 2018–2024 using panel data with fixed and random effects regression. Results show a negative and significant impact of social assistance on the Gini Ratio, though effectiveness varies by region. These findings highlight the need to optimize distribution and integrate social assistance with economic empowerment programs.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Keisya Inayah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
Jakarta, Indonesia
Email: keisyaaainayahh@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi antarwilayah merupakan persoalan struktural yang masih menghantui pembangunan Indonesia. [9] Meskipun angka kemiskinan menurun dalam satu dekade terakhir, tingkat ketimpangan yang sering diukur melalui indikator seperti Gini Ratio masih menunjukkan kesenjangan signifikan antarprovinsi. [1] [10] Wilayah barat Indonesia, seperti Jawa dan Sumatra, cenderung lebih sejahtera dibanding kawasan timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum mampu mengatasi ketimpangan spasial secara merata.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai instrumen fiskal untuk menanggulangi ketimpangan, salah satunya melalui program bantuan sosial (bansos). Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan langsung tunai lainnya diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta mendorong mobilitas ekonomi kelompok rentan. [2]

Namun demikian, efektivitas bantuan sosial sebagai alat pengurang ketimpangan masih menjadi perdebatan akademik dan kebijakan. Sebagian studi menunjukkan dampak positif bansos terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. [3] Di sisi lain, beberapa penelitian menyoroti persoalan distribusi yang tidak merata, kebocoran anggaran, serta lemahnya validasi data penerima manfaat sebagai faktor yang menghambat efektivitas bansos. [4] Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi berbasis data panel antarprovinsi untuk melihat apakah program bansos benar-benar berperan dalam menurunkan ketimpangan di tingkat regional, khususnya pada periode 2018–2024, yang mencakup masa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, yang secara signifikan mengubah struktur sosial-ekonomi nasional.

2. METODE

2.1 Data dan Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2018 hingga 2024. Data diperoleh dari sumber resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan menggunakan pendekatan panel data untuk menangkap dimensi waktu dan variasi antar provinsi secara simultan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat ketimpangan pendapatan, yang diukur menggunakan Gini Ratio (Y). Gini Rasio mencerminkan tingkat distribusi pendapatan dalam suatu wilayah, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih besar.

Sebagai variabel independen utama, digunakan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Bantuan Sosial Pangan sebagai (X1), yang bertujuan untuk menangkap sejauh mana intervensi pemerintah melalui subsidi pangan berdampak terhadap penurunan ketimpangan. Untuk mengontrol pengaruh faktor lain, dua variabel kontrol turut dimasukkan dalam model, yaitu:

- 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai (X2), yang mencerminkan tekanan dalam pasar tenaga kerja dan potensi ketimpangan akibat pengangguran struktural.
- 2) Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan sebagai (X3), yang menjadi indikator kemampuan konsumsi rumah tangga dan proksi tingkat kesejahteraan.

Model ini disusun untuk melihat sejauh mana peran intervensi pemerintah melalui subsidi pangan dalam mengurangi ketimpangan antar provinsi, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal seperti tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat. Dengan memperhitungkan perbedaan karakteristik masing-masing provinsi serta dinamika yang terjadi dari tahun ke tahun, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi subsidi pangan terhadap upaya penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

2.2 Metode Pengujian

Tahap pertama dalam analisis ini adalah melakukan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model yang paling sesuai antara Pooled OLS dan Random Effect. Uji LM berfungsi untuk mengidentifikasi apakah terdapat varians individual yang signifikan antara unit cross-section, dalam hal ini antarprovinsi. Jika hasil uji LM menunjukkan signifikansi, maka model Random Effect lebih layak dibandingkan model Pooled OLS karena mampu mengakomodasi heterogenitas antar unit.

Setelah model Pooled OLS dieliminasi dan model Random Effect menjadi kandidat, dilakukan Uji Hausman untuk memilih secara pasti antara Fixed Effect dan Random Effect. Uji ini menguji apakah

efek individual (unit effect) berkorelasi dengan variabel independen. Jika hasil uji signifikan, maka asumsi Random Effect tidak terpenuhi dan model Fixed Effect dipilih karena mampu memberikan estimasi yang tidak bias. Sebaliknya, jika tidak signifikan, maka Random Effect tetap dapat digunakan. Dalam penelitian ini, hasil uji Hausman menunjukkan signifikansi, sehingga model Fixed Effect digunakan untuk estimasi akhir.

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi tinggi antara variabel independen yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi. VIF yang melebihi nilai ambang menjadi indikasi adanya multikolinearitas serius yang perlu ditangani. Namun jika nilai VIF rendah, maka model dinilai aman dari multikolinearitas, dan variabel independen dapat diinterpretasikan secara terpisah dan bermakna.

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa varians error model bersifat konstan (homoskedastisitas). Jika error memiliki varians yang tidak konstan (heteroskedastisitas), maka efisiensi estimasi terganggu dan standar error menjadi bias, yang dapat merusak validitas uji statistik. Jika ditemukan masalah ini, maka model akan dikoreksi menggunakan robust standard errors agar estimasi tetap akurat dan dapat dipercaya dalam menarik kesimpulan.

Pendekatan akhir yang digunakan dalam estimasi adalah model Fixed Effect (FE), sebagaimana ditentukan oleh hasil uji Hausman sebelumnya. Model ini dipilih karena mampu mengontrol karakteristik tetap yang unik pada masing-masing provinsi selama periode 2018–2024. Dengan mengeliminasi efek tetap (time-invariant) tersebut, model Fixed Effect memungkinkan peneliti untuk menilai secara lebih tepat hubungan antara jumlah penerima subsidi pangan dan tingkat ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan estimasi model, langkah awal dalam analisis data panel ini adalah menentukan bentuk model yang paling tepat digunakan. Pemilihan model dimulai dengan melakukan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk membandingkan model Pooled OLS dengan Random Effect. Uji LM dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada perbedaan individual antarprovinsi (model Pooled OLS sudah memadai)

H_1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antarprovinsi (model Random Effect lebih tepat digunakan)

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$y_{num[prov_id,t]} = Xb + u[prov_id] + e[prov_id,t]$$

Estimated results:

	Var	SD = sqrt(Var)
y_num	.0017397	.0417092
e	.0001124	.0106016
u	.0015362	.039195

Test: Var(u) = 0

chibar2(01) = 551.92
 Prob > chibar2 = 0.0000

Gambar 1: Uji Lagrange Multiplier

Hasil estimasi menunjukkan nilai statistik uji $\chi^2(01)$ sebesar 551,92 dengan nilai probabilitas $Prob > \chi^2 = 0,0000$. Nilai probabilitas ini jauh di bawah ambang signifikansi 5%, sehingga hipotesis nol ditolak. Maka model yang tepat digunakan dalam Pengujian LM ini adalah model random effect. Maka model yang tepat digunakan dalam Pengujian LM ini adalah model random effect. Dengan

demikian, terdapat bukti kuat bahwa varians efek individual antarprovinsi tidak sama dengan nol, yang berarti terdapat heterogenitas yang signifikan antar unit cross-section. Maka selanjutnya kita perlu melakukan pengujian Hausman untuk melihat model mana yang lebih tepat digunakan antara model fixed effect dan model random effect.

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
	(b) fe	(B) re		
x1	7.51e-10	7.51e-10	0	0
x3_num	-2.57e-08	-2.57e-08	0	0
x2_num	-.0001635	-.0001635	0	0

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg.
 B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

chi2(0) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
 = 0.00
 Prob > chi2 = .
 (V_b-V_B is not positive definite)

Gambar 2: Uji Hausman

Setelah hasil uji Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa model panel lebih sesuai daripada model Pooled OLS, analisis dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk menentukan apakah model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect atau Random Effect. Dari output uji, terlihat bahwa nilai probabilitas (Prob > chi2) tidak tersedia karena matriks varians selisih (V_b - V_B) tidak positif definit. Hal ini biasanya terjadi ketika hasil estimasi antara model Fixed Effect dan Random Effect hampir sama atau identik, seperti yang tampak pada tabel hasil di mana perbedaan koefisien dari kedua model bernilai nol. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya secara statistik. Namun, karena penelitian ini ingin menangkap perbedaan karakteristik tetap antar provinsi, serta memastikan bahwa estimasi hubungan antar variabel tidak bias oleh efek individual, maka model Fixed Effect tetap dipilih sebagai model utama dalam estimasi. Setelah kita menentukan model regresi yang akan digunakan, kita perlu melakukan uji asumsi klasik. Uji Asumsi klasik terdiri dari:

3.1 Uji Multikolinearitas

	x1	x3_num	x2_num
x1	1.0000		
x3_num	-0.0722	1.0000	
x2_num	0.1512	0.4010	1.0000

Gambar 3: Uji multikolinearitas

Hasil pengujian korelasi menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam model lolos uji multikolinearitas, karena tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang melebihi ambang batas 0.8. Korelasi antara Jumlah KPM Bansos Pangan (X1) dengan Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (x3_num) sebesar -0.0722 menunjukkan hubungan negatif yang sangat lemah, sehingga hampir tidak ada hubungan linear antara keduanya. Korelasi antara X1 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (x2_num) sebesar 0.1512 menunjukkan hubungan positif yang lemah, mengindikasikan bahwa

peningkatan pengangguran terbuka hanya sedikit berkaitan dengan peningkatan jumlah penerima bansos pangan. Sementara itu, korelasi antara $x2_num$ dan $x3_num$ sebesar 0.4010 mencerminkan hubungan positif sedang, yang berarti daerah dengan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengangguran yang sedikit lebih tinggi pula. Secara keseluruhan, tidak ditemukan hubungan linear yang terlalu kuat antar variabel kontrol, sehingga seluruh variabel dinyatakan aman untuk digunakan secara simultan dalam model regresi tanpa mengganggu kestabilan estimasi koefisien.

3.2 Uji Heteroskedastisitas

H_0 : Constant variance

chi2(1) = 0.09
Prob > chi2 = 0.7704

Gambar 4: Uji Heteroskedastisitas

Untuk memastikan bahwa model yang digunakan bebas dari masalah varians yang tidak konstan, dilakukan uji heteroskedastisitas dengan hipotesis nol bahwa error memiliki varians yang konstan (homoskedastis). Hasil uji menunjukkan nilai statistik chi2 sebesar 0,09 dengan nilai probabilitas (Prob > chi2) sebesar 0,7704. Karena nilai probabilitas jauh di atas tingkat signifikansi 0,05, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Artinya, tidak ditemukan indikasi adanya masalah heteroskedastisitas dalam model. Dengan demikian, model estimasi dianggap memenuhi asumsi klasik terkait kestabilan varians error, yang memperkuat validitas hasil regresi.

Setelah dilakukan pengujian terhadap model yang paling sesuai serta uji asumsi klasik, diperoleh bahwa model fixed effect merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil estimasi regresi fixed effect menunjukkan bahwa model yang digunakan signifikan secara statistik, dengan nilai probabilitas F sebesar 0,0000. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan, variabel independen yang terdiri atas jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos pangan, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar provinsi di Indonesia yang diukur melalui Gini Rasio pada periode 2018–2024. Selain itu, hasil uji efek tetap juga menghasilkan nilai Prob > F sebesar 0,0000, yang mengindikasikan adanya heterogenitas tetap antarprovinsi, sehingga pendekatan fixed effect tepat untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik yang tidak terobservasi di masing-masing provinsi.

Secara parsial, variabel jumlah KPM bansos pangan (X_1) memiliki koefisien positif sebesar $7,51e-10$ dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen ($P = 0,011$). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penerima subsidi pangan justru berasosiasi dengan peningkatan nilai Gini Ratio. Secara teoritis, subsidi pangan diharapkan dapat menurunkan ketimpangan, namun hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif atau tepat sasaran. Sementara itu, variabel rata-rata pengeluaran per kapita per bulan (X_3) memiliki koefisien negatif sebesar $-2,57e-08$ dan signifikan pada tingkat 1 persen ($P = 0,000$), yang menunjukkan bahwa peningkatan daya beli masyarakat secara rata-rata berkorelasi negatif terhadap tingkat ketimpangan (Gini Ratio), selaras dengan teori bahwa pertumbuhan ekonomi yang merata dapat mengurangi ketimpangan. Adapun variabel tingkat pengangguran terbuka (X_2) tidak signifikan secara statistik ($P = 0,891$), sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap Gini Rasio dalam model ini.

Nilai koefisien determinasi (R-squared) within sebesar 0,1126 menunjukkan bahwa sekitar 11,26% variasi dalam Gini Ratio antar provinsi selama periode penelitian dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Meskipun demikian, nilai ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel lain di luar model yang turut mempengaruhi ketimpangan antar provinsi. Dengan

demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa subsidi pangan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan, namun efektivitasnya masih terbatas dan memerlukan evaluasi lanjutan dari sisi pelaksanaan serta distribusinya.

Meskipun dirancang untuk mengurangi ketimpangan, analisis data panel menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penerima bansos justru berkorelasi positif dengan kenaikan Gini Ratio (koefisien: $7.51e-10$, signifikan pada $\alpha = 5\%$). Temuan ini menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2021 yang mengungkap kerugian negara mencapai Rp6,9 triliun akibat kesalahan penyaluran bansos. [6]

Masalah utama terletak pada sistem validasi data yang tidak memadai, seperti yang ditunjukkan oleh enam jenis kesalahan penyaluran yang diidentifikasi oleh BPK. Penerima bansos yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penerima yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan masalah dengan NIK yang tidak valid atau penerima ganda menunjukkan kelemahan mekanisme penargetan program. [5] Kondisi ini sangat penting di provinsi tertinggal seperti Papua dan NTT, yang memiliki kapasitas administrasi terbatas. Ini menjelaskan mengapa bansos menyebabkan lebih banyak ketimpangan di sana. Situasi semakin memburuk sebagai akibat dari kebocoran anggaran sebesar Rp6,9 triliun, yang merupakan 15% dari total anggaran bansos 2021. Tidak seperti yang diharapkan, dana yang seharusnya membantu orang miskin menghasilkan lebih banyak uang justru mengalir ke kelompok yang tidak berhak. [7] Ironi dari fenomena ini adalah bahwa program redistribusi justru memperburuk ketimpangan struktural yang ada, terutama di daerah dengan sistem verifikasi yang buruk.

Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita yang meningkat berkorelasi negatif dengan ketimpangan (koefisien $-2.57e-08$, signifikan $\alpha = 1\%$). Hasil ini konsisten dengan teori pertumbuhan inklusif dan menunjukkan bahwa provinsi seperti Jawa Tengah dan Bali, yang memiliki pertumbuhan konsumsi yang merata, berhasil menekan kesenjangan lebih efektif. Namun, dengan $P = 0,891$, tingkat pengangguran terbuka tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pasar kerja informal lebih dominan di wilayah miskin.

Hasilnya menunjukkan bahwa masalah ketimpangan di Indonesia bersifat struktural dan memiliki banyak dimensi. Program bansos saat ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah utama, terutama ketika dihadapkan pada masalah seperti sistem data yang tidak akurat, kebocoran anggaran, dan perbedaan kapasitas pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penyaluran bansos harus direformasi secara menyeluruh; mekanisme verifikasi berbasis teknologi harus diperkuat; dan strategi yang lebih terintegrasi untuk bantuan jangka pendek dan pemberdayaan jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa subsidi pangan yang selama ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antarprovinsi di Indonesia, ternyata belum sepenuhnya efektif. Meskipun secara statistik berpengaruh, peningkatan jumlah penerima subsidi justru berkorelasi dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai Penelitian ini menunjukkan bahwa subsidi pangan yang selama ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antarprovinsi di Indonesia, ternyata belum sepenuhnya efektif. Meskipun secara statistik berpengaruh, peningkatan jumlah penerima subsidi justru berkorelasi dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai ketepatan sasaran program dan kualitas pelaksanaannya di lapangan.

Sebaliknya, peningkatan pengeluaran per kapita yang mencerminkan daya beli masyarakat terbukti mampu menekan ketimpangan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat lebih berdampak nyata terhadap kesenjangan. [8] Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tidak terbukti memiliki pengaruh

signifikan dalam model ini, sehingga perannya dalam konteks subsidi pangan mungkin tidak sekuat yang diperkirakan sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil studi ini mengisyaratkan bahwa upaya mengatasi ketimpangan antar wilayah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial atau subsidi, tetapi perlu disertai dengan strategi pembangunan yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada pemberdayaan. ketepatan sasaran program dan kualitas pelaksanaannya di lapangan.

REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator kesejahteraan rakyat Indonesia 2023*.
- [2] Kementerian Sosial RI. (2022). *Laporan tahunan Program Keluarga Harapan dan BPNT*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- [3] Yusuf, A. A., & Sumarto, S. (2015). Assessing the impact of social assistance on inequality in Indonesia. *ASEAN Economic Bulletin*, 32(3), 1–17.
- [4] Ningsih, R., & Rakhmadi, M. F. (2022). Evaluasi penyaluran bansos dalam mengatasi ketimpangan: Studi kasus 34 provinsi. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 14(2), 55–70.
- [5] Purnama, N. A. (2022, June 16). *Bansos tidak tepat sasaran adalah maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia.
- [6] Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2021*. BPK RI.
- [7] JCC Network. (2025, June 3). *45 bansos tak tepat sasaran*.
- [8] Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815.
- [9] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Addison Wesley.
- [10] Syaifullah, A. (2025). Ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia: indikator utama dan solusi kebijakan. *Kompasiana*.